

BAB II

Dinamika Kekerasan Terhadap Perempuan di Kenya: Sejarah dan Kesetaraan Gender

2.1 Dinamika Pembentukan UN Women

UN Women merupakan organisasi antar pemerintah yang dibawah oleh naungan PBB, Organisasi UN women didirikan pada Juli 2010 dan dioperasionalkan pada Januari 2011 berdasarkan Resolusi Majelis Umum nomor 64/289. Sejak pertama didirikan UN Women yang diketuai oleh mantan Presiden Chlo, yakni Michelle Buchletet sebagai Direktur Eksekutif. Kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh mantan Wakil Presiden Afrika Selatan yakni Phumazile Mlambo – Ngeuka pada 10 Juli 2013 sebagai Direktur Eksekutif hingga saat ini (UN Women, 2020). Data deskriptif mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kenya antara tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tantangan yang signifikan, terutama dalam konteks pandemi COVID-19 yang memperburuk situasi. Lonjakan kasus pandemi COVID-19, terdapat laporan yang sangat signifikan mengenai kekerasan terhadap perempuan. Menurut laporan UN Women, terdapat peningkatan 30% dalam kasus kekerasan domestik di Kenya selama periode lockdown, data laporan dari Kementrian Gender di Kenya menunjukkan bahwa pada tahun 2020, lebih dari 14.000 kasus kekerasan berbasis gender dilaporkan, dan selalu meningkat pada tahun – tahun berikutnya.

2.1.1 Tugas UN Women

Tugas UN Women memainkan peran sentral dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kenya melalui berbagai tugas dan inisiatif yang melibatkan upaya pemberdayaan perempuan, perubahan sosial, dan peningkatan sistem hukum serta layanan bagi

korban kekerasan berbasis gender (KBG). Tugas UN Women ini adalah mempromosikan kesetaraan gender diseluruh dunia, khususnya di negara – negara dengan kekerasan gender yang begitu tinggi serta menganut budaya patriarki. UN Women berupaya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan memenuhi hak – hak kaum perempuan dengan cara mengimplemntasikan serangkaian program seperti pemberdayaan perempuan, pendidikan untuk perempuan serta beberapa program lainnya di seluruh negara PBB.

2.1.2 Visi UN Women dan Misi UN women

Adapun visi dari UN Women sendiri adalah di mana setiap perempuan dan gadis dapat menjalani kehidupan bebas dari diskriminasi dan kekerasan memiliki kesempatan setara untuk berkontribusi dan berkembang, dan menikmati hak-hak asasi manusia mereka secara penuh. UN Women bekerja untuk menciptakan dunia di mana kesetaraan gender terwujud dalam berbagai bidang kehidupan sosial politik dan ekonomi (Galuh Artika Suri, 2020). Misi UN Women yaitu mempercepat kemajuan menuju kesetaraan gender dan pemberdayaan melalui upaya Meningkatkan Kepemimpinan dan Partisipasi: Mengembangkan dan memperkuat kapasitas perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan di berbagai sektor dan tingkat pemerintahan, Mengakhiri Kekerasan Berbasis Gender: Mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan gadis, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, maupun kekerasan berbasis gender lainnya. Mendukung Ekonomi dan Pekerjaan: Meningkatkan akses perempuan terhadap pekerjaan yang layak, pendapatan yang adil, dan kesempatan ekonomi yang setara, Mengamankan Hak – hak Reproduksi dan Kesehatan: Mendorong akses yang lebih baik untuk layanan kesehatan reproduksi dan hak – hak seksual serta mengatasi masalah kesehatan yang mempengaruhi perempuan secara khusus. Mengubah Norma Sosial dan Budaya: Mengatasi norma

dan praktik sosial yang merugikan perempuan dan gadis, serta mempromosikan kesetaraan gender di seluruh masyarakat

2.1.3 Ruang Lingkup UN Women yang mencakupi:

- a. Kebijakan dan Advokasi:** Mengembangkan dan mempromosikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di tingkat nasional dan internasional.
- b. Pandanaan dan Dukungan Program:** Menyalurkan dukungan finansial dan teknis kepada negara – negara anggota untuk implementasi program – program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
- c. Penelitian dan Data:** Mengumpulkan dan menganalisis data tentang kondisi perempuan di berbagai untuk mendukung perumusan kebijakan dan program yang efektif.
- d. Kemitraan dan Jaringan:** Berkolaborasi dengan pemerintah, masyarakat, sipil, sektor swasta, organisasi internasional guna memperkuat usaha – usaha dalam mencapai kesetaraan gender.
- e. Edukasi dan Kesadaran:** Menyebarluaskan pengetahuan tentang pentingnya kesetaraan gender dan hak – hak perempuan, serta memaksimalkan kesadaran masyarakat tentang isu – isu gender.

2.2 Peran dan Kontribusi Umum UN Women Dalam Pemberdayaan Perempuan

UN Women diketuai oleh seorang Direktur Eksekutif yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan dan program. Kantor pusatnya berada di New York, dengan kantor regional dan negara di berbagai belahan dunia yang berfokus pada kebutuhan spesifik regional dan nasional. UN Women bekerja dengan negara – negara anggota PBB, badan –

badan internasional lainnya, serta masyarakat sipil, untuk menyebarkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara global. *UN Women* menggantikan entitas sebelumnya. Dikenal dengan *UNIFEM* yang menjadi bagian dari kelompok pembangunan PBB. Mantan Presiden Chile, Michelle Bachelet, menjabat sebagai Direktur Eksekutif pertama *UN Women*.

Pada Juli 2010, Majelis Umum PBB secara resmi membentuk *UN Women*. Pendirian organisasi ini menandai langkah bersejarah negara-negara untuk mempercepat pencapaian tujuan global di bidang tersebut. *UN Women* dibentuk sebagai solusi terhadap berbagai tantangan, seperti kurangnya pendanaan serta ketiadaan lembaga yang diakui untuk memimpin dan mengoordinasikan upaya PBB terkait isu kesetaraan gender. Organisasi ini bertujuan memberikan suara yang kuat bagi perempuan dan anak perempuan di tingkat global, regional, hingga lokal (Gonzalez, *Análisis de Legislación sobre Femicidio/Feminicidio en América Latina y el Caribe e Insumos para una Ley Modelo*, 2018).

Kasus diskriminasi perempuan seperti yang terjadi di bawah rezim Taliban menunjukkan bagaimana ideologi agama dan nilai-nilai kesukuan dapat memposisikan perempuan pada tingkat yang paling rendah dalam masyarakat. Situasi serupa masih ditemukan di Kenya, meskipun telah terjadi beberapa kemajuan. Salah satu faktor utama yang mempertahankan pola diskriminasi ini adalah pandangan tradisional yang menganggap perempuan sebagai beban keluarga. Hal ini muncul karena perempuan sering kali tidak memiliki kontribusi ekonomi yang setara dengan laki-laki.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah Kenya dan lembaga penegak hukum untuk memberikan perhatian serius terhadap isu diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Di sisi lain, perlu ada upaya untuk mengatasi akar permasalahan yang melanggengkan ketidaksetaraan tersebut. Diskriminasi terhadap perempuan tidak hanya terjadi dalam lingkup keluarga, tetapi juga meluas ke berbagai sektor, seperti pendidikan, sosial, politik, kesehatan, dan ekonomi (Tapi Omas Ihrom, 2000). Selain itu, diskriminasi yang terjadi di Kenya terjadi karena faktor kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, kelemahan penegak hukum, dan sistem peradilan. Agenda UN Women di Kenya dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan saat pandemi covid-19 hingga sekarang merupakan bagian dari upaya global untuk menanggulangi masalah kekerasan berbasis gender, serta mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan UN Women, sebagai badan PBB yang berfokus pada isu – isu gender, bekerja dengan pemerintah, lembaga internasional, dan organisasi lokal untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dengan pendekatan holistik yang mencakup pencegahan, dukungan korban, serta perubahan kebijakan. UN Women berfokus pada penguatan sistem dukungan untuk korban kekerasan baik di tingkat nasional maupun lokal, seperti tempat perlindungan dan layanan darurat, UN Women bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non pemerintah untuk menyediakan tempat perlindungan aman bagi perempuan korban kekerasan, termasuk bagi korban kekerasan seksual. Mereka juga mendukung penyediaan layanan kesehatan mental dan fisik yang dibutuhkan oleh korban. UN Women berperan juga dalam memfasilitasi dan memperkuat keberadaan pusat – pusat ini seperti Pusat Penanganan Kekerasan Terpadu (*One Stop Centers*), yang menyediakan layanan medis, hukum, psikososial, dan dukungan lainnya dalam satu tempat. Ini membuat korban kekerasan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih mudah.

2.3 Konflik Bersenjata Internal yang terjadi di Kenya dan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan dalam konflik bersenjata internal di Kenya adalah isu yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai factor mendalam. Konflik – konflik internal di Kenya, baik yang berskala besra maupun yang bersifat lokal, telah memiliki dampak yang signifikan terhadap perempuan, baik sebagai korban langsung kekerasan maupun sebagai kelompok yang terpinggirkan dalam upaya rekontruksi pasca konflik. Kekerasan berbasis gender (GBV), termasuk kekerasan seksual, sering kali menjadi senjata perang dalam konflik di negara ini. Pada tahun 2020, meskipun Kenya tidak terlibat dalam konflik bersenjata internal skala besar seperti terjadi pada kerusuhan pasca pemilu 2007-2008, masalah kekerasan berbasis gender (GBV) tetap menjadi isu besar. Perempuan di Kenya yaitu yang tinggal di wilayah – wilayah yang terdampak konflik, terus mengalami kekerasan, baik dalam konteks kekerasan sosial-politik maupun kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, tahun 2020 juga menandai pengaruh besar pandemi COVID-19 terhadap perempuan, memperburuk masalah kekerasan domestik dan menghambat akses ke layanan perlindungan dan dukungan. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat besar terhadap perempuan Kenya, memperburuknya situasi kekerasan berbasis gender yang sudah ada. Pembatasan pergerakan dan penguncian (lockdown) menyebabkan peningkatan signifikan dalam kekerasan domestik dan kekerasan seksual. Beberapa dampak utama dari pandemi terhadap kekerasan perempuan di Kenya adalah seperti kekerasan seksual dengan adanya terisolasi di rumah selama lockdown, perempuan, terutama yang tinggal di daerah terpencil atau kumuh, lebih rentan terhadap kekerasan seksual, baik dari anggota keluarga, tetangga, atau orang lain. Laporan dari UNFPA menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan seksual yang melaporkan kejadian tersebut meningkat pada tahun 2020 (UNFPA, 2020). Dalam periode 2020 hingga 2023, beberapa entitas

dan kebijakan di Kenya berfokus pada penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, UN Women sendiri berperan aktif dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Kenya melalui berbagai rangkaian program. Mereka berkolaborasi dengan pemerintah dan organisasi lokal untuk memaksimalkan kesadaran dan memberikan dukungan kepada para korban. Melalui unit khusus yang menangani kasus kekerasan berbasis gender, kepolisian berupaya untuk meningkatkan respons terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan memberikan pelatihan kepada petugas tentang penanganan kasus tersebut, selain itu juga negara Kenya melakukan kampanye global untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan terhadap perempuan dan mendorong tindakan dari pemerintah dan masyarakat, program yang dilakukan Kenya yaitu Program 16 Hari Aktivitas Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas, 2020).

Tabel 2. 1 Jumlah Kasus Femicide Kekerasan Perempuan yang terjadi di Kenya

Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kekerasan
Tahun	14000	Pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan psikologis dan femicide.
Tahun	5000	Pemeriksaan dan pelecehan seksual.
Tahun	17000	Pada tahun 2022 kasus ini termasuk kedalam Kekerasan Berbasis Gender (GBV).
Tahun	18000	Kasus kekerasan ini termasuk kekerasan domestik, pemeriksaan, pelecehan seksual, dan kekerasan psikologis.

Tahun	20000	Kasus Kekerasan Berbasis Gender (GBV) tercatat pada tahun 2024 terhitung dari bukan Januari-Oktober.
-------	-------	--

Sumber: (KENYA COVID-19 RECOVERY, 2023)

Tabel di atas merupakan jumlah kasus feminicide kekerasan perempuan di Kenya dari tahun 2020-2023. Dalam tabel tersebut terdapat peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2020 kasus kekerasan di Kenya mencapai 14.000 kasus kekerasan berbasis gender (GBV) tercatat, yang meliputi pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan psikologis. Feminicide atau pembunuhan perempuan karena alasan gender, juga meningkat. Laporan dari FIDA Kenya menunjukkan bahwa setidaknya 239 perempuan terbunuh pada tahun 2020 akibat kekerasan berbasis gender. Pada tahun 2021 kasus kekerasan perempuan ini mencapai 5.000 kekerasan berbasis gender (GBV) yang diterima, yang mencakup kekerasan domestik, pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Angka ini meningkat dibanding tahun – tahun sebelumnya. FIDA juga menyebutkan bahwa meskipun ada penurunan sedikit setelah pandemi, tingkat kekerasan masih tergolong tinggi. Pada tahun 2022 kasus kekerasan terhadap perempuan ini mencapai 17.000 yang mencakup kekerasan domestik, pemerkosaan, dan lain – lain. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada usaha yang lebih besar untuk mengatasi masalah ini, tantangannya masih cukup besar. Pada tahun 2023 kasus kekerasan berbasis gender (GBV) ini mencapai 18.000 kasus yang tercatat sepanjang tahun. Kasus kekerasan ini termasuk kekerasan domestik, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan psikologis. Meskipun ada upaya lebih banyak untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong pelaporan, data menunjukkan bahwa tingkat kekerasan masih tetap tinggi. Meskipun ada beberapa kemajuan dalam hal kebijakan dan pelaporan, kekerasan terhadap perempuan di

Kenya, termasuk feminicide, tetap menjadi masalah yang serius, lebih dari 20.000 kasus kekerasan berbasis gender (GBV) tercatat pada tahun 2024, dan lebih dari 270 perempuan terbunuh dalam kasus femicide. Penyebab utama dari kekerasan terhadap perempuan di Kenya adalah ketidaksetaraan gender yang berlangsung, serta kegagalan sistem hukum dan sosial dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan. Meskipun berbagai lembaga internasional dan nasional terus berupaya untuk mengatasi masalah ini, berbagai macam upaya yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan penuh terhadap perempuan di Kenya.

Pada tahun 2024, Kenya memiliki populasi sebesar 56.203.030 jiwa dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Negara ini terdiri dari berbagai kelompok etnis, termasuk Kikuyu (22%), Luhya (14%), Luo (13%), Kalenjin (12%), Kamba (11%), Kisii (6%), Meru (6%), etnis lainnya (15%), serta non-Afrika (1%). Berbeda dengan keragaman etnis, keberagaman agama di Kenya lebih terbatas, dengan mayoritas penduduk memeluk agama Kristen sebesar 83% (Protestan 47,7%, Katolik 23,4%, Kristen lainnya 11,9%), diikuti oleh Islam (11,2%), dan penganut agama tradisional (1,7%). Untuk bahasa, Kenya secara resmi menggunakan bahasa Inggris dan Kiswahili, sementara bahasa-bahasa pribumi juga digunakan secara lokal. Pada pertengahan abad ke-20, Kenya dikenal dengan tingkat pertumbuhan penduduk cukup tinggi akibat tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian rendah. Lebih dari 40% penduduk yang berumur 15 tahun sudah menikah dan melahirkan anak. Namun, pada tahun 1990-an, Kenya menghadapi wabah HIV/AIDS yang merenggut banyak nyawa, menyebabkan penurunan populasi, peningkatan angka kematian bayi, harapan hidup yang lebih rendah, serta perubahan distribusi penduduk. Meskipun demikian, dengan

upaya pemerintah untuk mengendalikan penyebaran HIV/AIDS, populasi Kenya secara perlahan mulai pulih meskipun penyakit ini belum sepenuhnya teratasi. Kepadatan penduduk yang tinggi di Nairobi menyebabkan berbagai masalah lingkungan, seperti polusi air akibat limbah perkotaan dan industri. Sementara keberhasilan sektor pertanian turut berkontribusi pada penurunan kualitas air akibat penggunaan pestisida dan pupuk yang berlebihan. Selain itu, Kenya menghadapi tantangan lingkungan lain, seperti permasalahan eceng gondok di Danau Victoria, penggundulan hutan, pemburuan liar, dan kerusakan habitat satwa liar. Padahal, Kenya kaya akan keanekaragaman hayati yang menjadi daya tarik wisata utama. Jika pemburuan liar dan penggundulan hutan tidak dikendalikan, risiko kepunahan flora dan fauna akan meningkat, yang berpotensi mengurangi pendapatan negara dari sektor pariwisata. Penurunan jumlah wisatawan akibat hilangnya daya tarik wisata ini dapat berdampak negatif pada perekonomian Kenya (RAHMAN, 2019).

Di Kenya, perempuan terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan dari sektor formal dan informal. Fokus pekerjaan di negara Kenya ini sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut adalah beberapa sektor utama dimana perempuan di Kenya sering bekerja yaitu, pekerjaan rumah tangga dan pengasuh anak, dengan penutupan sekolah dan pembatasan sosial, banyak perempuan di Kenya yang terlibat dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuh anak. Mereka harus mengelola rumah tangga, menjaga anak – anak, dan mendampingi mereka dalam pembelajaran daring, yang mempengaruhi waktu dan kemampuan mereka untuk bekerja di luar rumah.

2.4 Program Yang dibuat UN Women Untuk Mengatasi Permasalahan Kekerasan Perempuan di Kenya.

UN Women telah membentuk berbagai program untuk mengatasi kekerasan berbasis gender (GBV) di Kenya. Program – program ini dirancang untuk menangani berbagai aspek dari masalah kekerasan terhadap perempuan, termasuk pencegahan perlindungan korban, pemulihan, serta advokasi untuk perubahan kebijakan dari budaya. Selain itu, UN Women juga bekerja untuk memastikan bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap keadilan dan dukungan. UN Women membuat beberapa program terkait kasus tersebut. Salah satu contohnya adalah program, tanggap darurat terhadap kekerasan berbasis gender (GBV) di masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan dampak yang sangat signifikan terhadap perempuan, terutama terkait dengan peningkatan kekerasan domestik akibat pembatasan sosial dan ketidakpastian ekonomi. UN Women merespon hal ini dengan mendukung berbagai inisiatif darurat untuk menangani peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan selama pandemi. Sebanyak dari 7.000 perempuan di Kenya mendapatkan akses ke layanan darurat konsultasi psikologis melalui hotline GBV yang disediakan selama pandemi. Selain itu, pencapaian lainnya dengan melalui kampanye kesadaran, UN Women berhasil menjangkau lebih dari 10 juta orang di Kenya melalui radio dan media sosial, yang meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya melaporkan kekerasan berbasis gender (Abridged, 2021). Beberapa organisasi internasional terkemuka yang bekerja dalam isu GBV antara lain: PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) melalui berbagai lembaganya, telah lama

menjadi pelopor dalam mengatasi masalah GBV. Berikut tabel dua lembaga utama yang terlibat adalah:

Tabel 2. 2 Tujuan dan Program yang dijalankan oleh UN Women

Lembaga	Tujuan Program	Aktivitas	Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi (M&E)
UN Women	Mencegah dan mengurangi kekerasan berbasis gender di Kenya	1. Kampanye kesadaran publik seperti “Orange the World”. Program ini telah diluncurkan oleh UN Women pada Tahun 2013 dan dengan puncaknya program ini dilaksanakan di Kenya setiap tanggal 25 November, sampai sekarang program ini masih terus berjalan untuk meminimalisir kekerasan perempuan dan anak perempuan	1. Pengumpulan data tentang prevalensi kekerasan berbasis gender dan analisis dampak kampanye 2. Penilaian dampak program pemberdayaan melalui wawancara dan survei dengan peserta program. 3. Evaluasi kebijakan dan program berbasis data statistik tentang jumlah kebijakan yang diimplementasikan dan jumlah kasus yang ditangan

		serta mendukung pemberdayaan mereka. 2. Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan dan pendidikan. Program ini telah dilaksanakan sejak Tahun 1959 di Kenya. 3. Penguatan kapasitas hukum dan kebijakan untuk melindungi perempuan	
UNICEF	Melindungi anak-anak dan perempuan dari kekerasan gender, terutama kekerasan terhadap anak perempuan	1. Kampanye kesadaran tentang hak anak perempuan dan perlindungannya terhadap kekerasan 2. Penyuluhan dan edukasi di sekolah-sekolah untuk mencegah kekerasan berbasis gender di	1. Pemantauan melalui laporan tahunan tentang kasus kekerasan terhadap anak perempuan dan efektivitas kampanye. 2. Evaluasi dampak program edukasi dan penyuluhan melalui tes, survei, dan wawancara

		kalangan anak-anak. 3. Penyediaan perlindungan bagi anak perempuan korban kekerasan (tempat aman, rehabilitasi).	dengan siswa dan guru. 3. Evaluasi layanan perlindungan melalui data korban yang diterima dan tingkat pemulihan mereka.
UNFPA	Mencegah dan mengurangi kekerasan gender, termasuk kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga	1. Meningkatkan akses perempuan dan remaja kepada layanan kesehatan reproduksi dan perlindungan seksual. 2. Menyediakan pelatihan kepada tenaga medis untuk menangani korban kekerasan berbasis gender 3. Kampanye untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak kesehatan seksual dan	1. Pemantauan melalui laporan tentang jumlah perempuan yang mengakses layanan kesehatan dan jumlah korban yang mendapat layanan 2. Evaluasi melalui pengumpulan data tentang pelatihan yang diberikan kepada tenaga medis dan efektivitas layanan kesehatan 3. Pemantauan dampak kampanye melalui survei masyarakat

		reproduksi perempuan	tentang pengetahuan mereka mengenai hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi	Sumber: Diolah oleh penulis Tabel 2.2 Tujuan dan
--	--	-------------------------	---	--

Program yang di jalankan oleh UN Women

Tujuan program UN Women menggambarkan tujuan utama yang ingin di capai oleh masing – masing lembaga dalam menangani kekerasan berbasis gender. UN Women berfokus pada pemberdayaan perempuan, peningkatan kesadaran tentang kekerasan berbasis gender, serta penguatan kebijakan dan sistem hukum, UNICEF berfokus pada perlindungan anak-anak, dengan penekanan khusus pada anak perempuan, serta peningkatan kesadaran dan pendidikan terkait kekerasan berbasis gender dan UNFPA mengutamakan kesehatan reproduksi perempuan dan remaja, serta perlindungan dari kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga.

Pusat pemulihan Kekerasan Berbasis Gender didirikan pada Maret 2001 dan sejak didirikan, telah mendukung lebih dari 58.000 penyintas pada 30 Juni 2023. Ini telah berperan dalam pemberlakuan Legislasi Nasional di bidang Kekerasan Berbasis Gender khususnya pada kebijakan Undang-Undang Pelanggaran Seksual 2006 dan dalam pengembangan dan revisi formulir Perawatan Pasca Pemerkosaan (RRC) yang diumumkan pada tahun 2012. GVRC berpartisipasi dalam penyusunan Kebijakan Gender Nasional dan penyertaan kursus GBV dalam kurikulum Diploma Keperawatan di antara dokumen nasional lainnya (Centre, 2023).

2.5 Landasan hukum dan Nilai – Nilai yang diimplementasikan yang berada di Kenya.

Kenya memiliki berbagai landasan hukum yang mengatur perlindungan perempuan, kekerasan gender, serta upaya melawan kekerasan berbasis gender (GBV). Beberapa undang – undang dan kebijakan utama yang melindungi termasuk konstitusi, undang – undang nasional, dan protokol internasional yang diadopsi oleh negara tersebut.

Konstitusi Kenya pada tahun 2010 merupakan landasan hukum tertinggi di negara ini dan memberikan perlindungan yang luas terhadap hak – hak perempuan dan kesetaraan gender. Beberapa ketentuan penting dalam konstitusi ini antara lain yang ada pada pasal 27 tentang kesetaraan dan Non – Diskriminasi yang menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan melarang diskriminasi berbagai jenis kelamin, status sosial, ras, agama, atau asal usul. Hal ini memberikan dasar hukum bagi perempuan untuk mendapatkan hak yang setara dalam semua aspek kehidupan termasuk pekerjaan, pendidikan, dan akses ke layanan, pasal 29 ini memberikan perlindungan terhadap individu dari kekerasan fisik atau psikologis, termasuk kekerasan berbasis gender. Dengan demikian, perempuan yang menjadi korban kekerasan rumah tangga atau kekerasan seksual dapat dilindungi oleh hukum (Government of Kenya GoK, 2010). Undang – undang kekerasan berbasis gender (The Sexual Offences Act) ini bertujuan untuk mrngatasi kekerasan seksual dan mendukung hak – hak korban, termasuk perempuan yang menjadi sasaran kekerasan seksual. Ketentuan penting dalam undang – undang penyusunan definisi kekerasan seksual yang mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan pencabulan, perlindungan korban memberikan perlindungan terhadap korban dengan mewajibkan sistem hukum untuk memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan psikologis dan medis korban kekerasan seksual, penerapan hukum berat bagi pelaku yang tegas ditujukan kepada pelaku kekerasan seksual, untuk memberikan efek jera dan melindungi korban (*Simplified Version*

of the Sexual, 2006). Pada tahun 2020, berbagai nilai – nilai yang berfokus pada kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan penanggulangan kekerasan berbasis gender (GBV) diimplementasikan di Kenya. Nilai – nilai ini berakar pada komitmen negara terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan, implementasi nilai – nilai tersebut terlihat melalui kebijakan, undang – undang serta program – program yang diluncurkan oleh pemerintah dan organisasi internasional seperti UN Women. Beberapa nilai penting yang diimplementasikan di Kenya dalam menghadapi kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020 antara lain, Kesetaraan Gender (Gender Equality) Kenya telah mengadopsi Konstitusi 2010, yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dan melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin (Pasal 27). Negara ini berusaha untuk mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam kebijakan dan program nasional, serta memperjuangkan hak – hak perempuan di berbagai bidang.

Pada tahun 2020, berbagai inisiatif dilakukan untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya kesetaraan gender, baik di tingkat komunitas maupun nasional. Kampanye media dan program pendidikan ditujukan untuk mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan berbasis gender (The Impact of COVID-19 on Gender Equality and Women's Empowerment in Kenya, 2020). Pada tahun 2020, Kenya menegakkan sejumlah nilai penting dalam upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan, dengan fokus pada kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, keadilan, dan pemberdayaan ekonomi. Komitmen terhadap nilai – nilai ini tercermin dalam kebijakan nasional, undang – undang, serta program yang dirancang untuk melindungi perempuan dan memerangi kekerasan berbasis gender, dengan dukungan dari lembaga internasional seperti UN Women dan organisasi lokal.